BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Preamble Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-empat, pada salah satu cita-cita dalam narasi utopisnya mengamanatkan ialah: “...*memajukan kesejahteraan umum*...”, dan untuk mencapai hal tersebut, secara keharusan dipenuhi dengan pertumbuhan ekonomi skala nasional yang ideal.

Ekonomi sebagai pilar pembangunan suatu negara tentu tidak akan pernah lepas sebagai pemegang peranan penting keberlangsungan hidup suatu negara. Aktivitas perekonomian tidak hanya menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, pendapatan nasional, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara holistik, dampak tersebut menjadi sebuah simbiosis pada suatu negara. Kestabilan kondisi pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai bentuk ketercapaian akan indikator positif yang berkelanjutan. Dan untuk menjaga kelangsungan kegiatan tersebut, pemerintah Negara memiliki peranan kunci dalam membentuk aktivitas ekonomi.

Kebijakan fiskal yang bijaksana dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, sementara regulasi yang efektif dapat melindungi konsumen, mencegah praktik bisnis yang merugikan, dan memastikan keadilan dalam persaingan pasar, dengan memperhatikan tidak terjadinya kebijakan yang terlalu restriktif atau terlalu liberal.

Oleh karenanya, Negara wajib mempertimbangkan kebijakan ekonomi yang adaptif dan fleksibel untuk menghadapi perubahan dalam dinamika global. Hal

ini juga menjadi tantangan ketahanan ekonomi untuk mengantisipasi kondisi terburuk apabila Negara menghadapi situasi krisis ekonomi.

Bercermin pada fakta sejarah, Indonesia pernah menghadapi krisis moneter pada tahun 1998. Salah satu periode paling sulit dan terburuk pada ekonomi Indonesia. Krisis ini dipicu oleh serangkaian faktor internal dan eksternal yang menyebabkan runtuhnya sistem keuangan dan ekonomi Negara.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia menyusut secara dramatis pada tahun 1998, dimana ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebanyak 13% serta depresiasi masif di nilai tukar rupiah.¹ Rupiah mengalami devaluasi signifikan, yang berakibat utang asing Indonesia lebih mahal dan meningkatnya tekanan di sektor keuangan.

Devaluasi ini memicu pembengkakan utang luar negeri perusahaan-perusahaan Indonesia yang berdenominasi dalam mata uang asing. Banyak perusahaan menghadapi kesulitan untuk membayar utang, dan sejumlah besar proyek-proyek pembangunan terhenti.

Problematis yang dihadapi pada masa tersebut menyebabkan banyaknya kasus-kasus kepailitan terjadi secara besar-besaran. Pemerintah Indonesia melaksanakan sejumlah reformasi ekonomi, termasuk restrukturisasi sektor perbankan, pengendalian inflasi, dan deregulasi ekonomi.

Untuk menguatkan struktur institusi demi menjamin adanya transparansi, persaingan yang adil, serta kerangka hukum dan regulasi yang lebih solid.

¹ Haryo Aswicahyono dan David Christian, 2017, *Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia 1997-2016*, Centre For Strategic and International Studies Working Paper Series, Economics Working Paper 02-2017, WPECON-201702, 2017, hlm. 1

Langkah-langkah ini meliputi reformasi yang bertujuan untuk merancang ulang sistem kepailitan dan juga mendirikan Pengadilan Niaga.²

Sebagai bagian dari reformasi di bidang ekonomi, lahirlah instrumen hukum berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menandai terjadinya revitalisasi dalam system hukum kepailitan di Indonesia, dengan membawa sejumlah perubahan dan pembaruan substansial yang membedakan aturan lama dengan sistem kepailitan baru secara signifikan.

Peristiwa krisis moneter menjadi titik balik perubahan signifikan bagi Indonesia. Dalam upaya penanganan pemulihan, reformasi ekonomi pasca krisis moneter 1998 dapat dikatakan relatif cepat. Meskipun pada awalnya mengalami kontraksi yang signifikan, pertumbuhan ekonomi mulai pulih pada akhir tahun 1999 dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

Perkembangan aktivitas ekonomi pasca pemulihan krisis moneter 1998 menjadikan pertumbuhan bisnis yang semakin kompetitif dan dinamis. Pelaku usaha berupaya untuk terus berkreasi dan berinovasi untuk mempertahankan eksistensi usahanya. Ini merupakan tantangan suatu perusahaan dalam satu kesatuan organ untuk mampu melihat peta peradaban dan peluang secara cermat, cakap, dan tanggap pada situasi ekonomi global.

Dunia usaha merupakan bagian integral dari kehidupan ekonomi global. Aktivitas bisnis yang melibatkan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa memainkan peran penting dalam pembentukan perekonomian suatu negara. Situasi yang terus berubah-ubah akibat perkembangan zaman ini juga menuntut pada perkembangan kebutuhan payung hukum sebagai perlindungan.

² *Ibid.*, hlm. 2

Pesatnya perkembangan ekonomi menimbulkan banyaknya permasalahan utang piutang, kebutuhan mendesak akan pembaharuan terkait pailit yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, saat ini telah diganti dengan disahkannya UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Meskipun banyak perusahaan berhasil bertahan dan terus mengalami tumbuh kembang, realitasnya tidak selamanya suatu perusahaan berjalan dengan baik dan semestinya, terkadang para pelaku usaha menemukan titik dimana usahanya tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya. Beberapa perusahaan menghadapi tantangan serius dan berisiko mengalami kepailitan.

Resiko tersebut menjadikan suatu Perusahaan dapat dipailitkan oleh kreditor guna mempertanggungjawabkan ketidaksanggupannya dalam meneruskan atau melanjutkan usahanya. Proses pemberesan harta boedoeil pailit juga tidak selamanya berjalan mulus, terutama sekali pada beberapa kasus debitor nakal dan/atau terindikasi itikad yang tidak baik dalam pemberesan utang-piutangnya.

Menghadapi permasalahan debitor nakal dan/atau beritikad baik ini, maka Negara tentunya memiliki langkah strategis dan taktis untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada pihak-pihak (kreditor) untuk dapat menerima hak nya. Upaya hukum untuk menanggulangi permasalahan ini dikenal dengan terminologi “*Gijzeling*” atau Penyanderaan atau Hukuman Paksa Badan.

Secara historis, *Gijzeling* di Indonesia mengalami berbagai macam kondisi pasang surut akan kehadirannya. Keberadaanya yang sempat dihapus, dan kemudian digunakan kembali menjadikan adanya beberapa kondisi dimana menurut penulis, pengaturan untuk pelaksanaan eksekusi *gijzeling* tumpang tindih (*conflicting norm*).

Berangkat dari latar belakang kehadiran, pasang surut keberadaan ketentuan *gijzeling*, hingga pelaksanaannya di Indonesia, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengulas *gijzeling* dengan menganalisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan tajuk: “*Eksistensi Lembaga Paksa Badan (Gijzeling) dalam Kepailitan di Indonesia.*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan diatas, penulis tertarik untuk membahas melalui rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tentang *Gijzeling* menurut hukum kepailitan di Indonesia?
2. Bagaimana eksistensi tentang *Gijzeling* menurut hukum kepailitan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis melalui penelitian ini, ialah untuk mengidentifikasi eksistensi (keberadaan) *gijzeling* melalui masalah implementasi atau pelaksanaan dari *gijzeling* dalam kepailitan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituangkan, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui eksistensi serta korelasi antara pengaturan dan konsep *Gijzeling* didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap peraturan terkait lainnya.

2. Untuk mengetahui dampak *Gijzeling* sebagai faktor penting untuk penertiban debitor yang beritikad tidak baik dalam perspektif hukum bisnis.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian serta analisis, penulis tentu memiliki sejumlah harapan yang dapat memberikan berbagai manfaat, di antaranya:

1. Dari sisi teori, penulis menginginkan agar penelitian ini berguna dalam pengembangan konsep ilmu hukum sesuai dengan kebutuhan dan konteks zaman sekarang. Penulis juga berharap, hasil pemikiran yang dituangkan dalam tulisan ini dapat menjadi acuan untuk menciptakan regulasi terbaru demi menciptakan kepastian hukum, khususnya terkait penerapan hukuman paksa badan dalam kasus kepailitan serta keterkaitannya dengan perkembangan hukum positif saat ini.
2. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari ilmu pengetahuan dan kemampuan akademis penulis, juga untuk melatih keterampilan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi. Selain itu, karya ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan hukuman paksa badan.

E. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, metode merupakan salah satu faktor penting dalam proses penyelesaian suatu masalah yang diteliti. Hal ini guna untuk mendapatkan data yang konkrit dan relevan dengan skripsi ini, penulis menggunakan metodologi sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah normatif-yuridis, yang bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji eksistensi gijzeling dalam sistem kepailitan Indonesia. Fokus penelitian adalah pada analisis normatif terhadap kedudukan hukum, implementasi, dan relevansi gijzeling sebagai instrumen penegakan hukum dalam proses kepailitan.

Dengan studi kepustakaan hukum melalui inventarisasi hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum nasional lainnya. Kemudian dikaitkan dengan pendapat-pendapat dan hasil penelitian para sarjana serta data berupa bahan dari kamus hukum.

Menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).³

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis, dengan maksud dan tujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dalam implementasi atas perkara yang diteliti oleh penulis serta kesesuaian antar peraturan-peraturan yang menyangkut tentang permasalahan.

Sebagai penelitian hukum yang berusaha untuk menerapkan permasalahan yang diteliti, deskriptif analitis dapat memberikan gambaran yang relevan tentang sifat-sifat atau karakteristik atau keadaan yang dijadikan sebagai bahan analisa.

³ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 23

Deskriptif analitis dalam penelitian ini adalah dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan teori-teori hukum yang berlaku dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

3. Sumber dan Jenis Data

Didalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai sumber data sebagai bahan kepenulisan, sebagaimana pendekatan yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif dan yuridis. Maka, sebagai sumber data dan jenis data yang digunakan dijabarkan sebagai berikut:

a. Sumber Data

Didalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai sumber data sebagai bahan kepenulisan, sebagaimana pendekatan yang digunakan penulis adalah penelitian hukum yuridis-normatif.

Sumber data yang digunakan sebagai ialah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan peraturan, buku, dan jurnal terkait lainnya.

b. Jenis Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa jenis data sebagai berikut:

- 1) Data Primer, dengan analisis Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan.

2) Data Sekunder, terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UUPPSP);
4. Kepustakaan yang berkaitan dengan *Gijzeling* yang terdiri dari jurnal-jurnal, makalah, dan website.

3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, surat kabar dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Didalam penelitian ini, pengumpulan data dan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen dan kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan dilakukan dengan mengumpulkan bahan tertulis yang berkaitan dengan penelitian, mulai dari bahan hukum primer hingga bahan hukum tersier.⁴

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dan bahan hukum tersebut telah terkumpul, penulis melakukan pengolahan data dengan menggunakan teknik pengolahan bahan hukum yang melewati beberapa rangkaian tahapan, mulai dari

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 160

pemeriksaan data, *editing*, dan diakhiri dengan sistematisasi bahan hukum.

Pengolahan data dan bahan hukum ini kemudian akan diikuti dengan analisis data dan bahan hukum. Didalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan ialah analisis dengan pendekatan yuridis-normatif.

F. Sistematika Penulisan

Didalam penelitian ini, kepenulisan dirumuskan dengan sistematika yang terdiri dari beberapa Bab. Masing-masing Bab juga terdiri dari beberapa Sub Bab. Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) **BAB I PENDAHULUAN:** Pada bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.
- 2) **BAB II TINJAUAN PUSTAKA:** Pada Tinjauan Pustaka, diuraikan beberapa kajian pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. Kajian pustaka ini menjadi landasan dan kerangka teori dalam penelitian ini. Dalam Bab ini akan diuraikan tinjauan-tinjauan umum.
- 3) **BAB III PEMBAHASAN:** Di dalam bab ini, memuat hasil dari penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan korelasi konsep dan peraturan tentang *gijzeling* terhadap UU Kepailitan dan PKPU serta eksistensi dalam implementasi *gijzeling* dalam kepailitan.
- 4) **BAB IV PENUTUP:** Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang diuraikan didalam tulisan ini.